

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2020. *Penguatan Sistem Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fajar, Mukti & Yulianto, Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2017. *Panduan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan Calon Tunggal*, Jakarta: KPU RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- McCann, Michael W. 1994. *Rights at Work: Pay Equity Reform and the Politics of Legal Mobilization*. Chicago: University of Chicago Press.
- Norris, Pippa. 2014. *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nelson, Joan M. Samuel P. Huntington. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Prayudi, et al. 2017. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.
- Tjenreng, M. Zubakhrum. B. 2020. *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Papas Sinar Sinanti, Depok.
- Unger, Roberto Mangabeira. *The Critical Legal Studies Movement: Another Time, A Greater Task*. New York: Verso, 1986.

Artikel Jurnal

- Aguilar, S., Santana, A., & Romanos, E. (2023). Marching and voting: The electoral protest cycle. *The Social Science Journal*, 1–15.
<https://doi.org/10.1080/03623319.2023.2222881>

- Chua, L. J. (2019). *Legal Mobilization and Authoritarianism. Annual Review of Law and Social Science*, 15, 359–378. <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-101518-042723>
- Ilham, Teguh. 2020. “Fenomena Calon Tunggal dalam Demokrasi Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol. XII, Edisi 2, Desember.
- Rizal, Akhmad. 2022. “Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan.” *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (IACS - CSPC 2022)*.
- Romli, Lili. 2018. “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal.” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15, No. 2, Desember, hlm. 143–160.
- Soleh, Muhammad Anwar & Amman, Durohim. 2024. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 3, September.
- Wasi, Imron & Permana, Panji Anugrah. 2024. “Gerakan Politik Kotak Kosong sebagai Oposisi Dinasti Politik Mulyadi Jayabaya Pada Pilkada Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi.” *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Vol. 50, No. 1, hlm. 61–80.
- Widyasari, Asita, Dewi, Reyke Anggia & Rengganis, Viera Mayasari Sri. 2017. “Gerakan Politik Pendukung Kotak Kosong: Keterlibatan Civil Society dalam Pilkada Kabupaten Pati Tahun 2017.” *Jurnal PolGov*, Vol. I, No. 1.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Junaidi, 2023, “*Fenomena Calon Tunggal Yang Didukung Mayoritas Partai Politik dan Implikasinya Terhadap Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*” Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Mahpudin, 2021, “*Gerakan Kotak Kosong Sebagai Electoral Movement : Studi Tentang Gerakan BAJUKOKO (Barisan Juang Kotak Kosong) Melawan Dominasi Kekuasaan Calon Tunggal Pada PILKADA Kabupaten Lebak Tahun 2018*” Thesis Master of Arts, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Internet

- Adi Prayitno. (2024). Ironi Calon Tunggal Pilkada 2024. UIN Jakarta. Diakses pada 16 Maret 2025 dari <https://uinjkt.ac.id/id/ironi-calon-tunggal-pilkada-2024>

- Amalia Sarabi. (2024). Ratna Dewi Pettalolo: Kampanye Kotak Kosong Mestinya Diberi Ruang. Rumah Pemilu. Diakses pada 16 April 2025 dari <https://rumahpemilu.org/ratna-dewi-pettalolo-kampanye-kotak-kosong-mestinya-diberi-ruang>
- Antara News. (2024). KPU Pangkalpinang umumkan perolehan suara pilkada ulang” <https://jambi.antaranews.com/berita/628513/kpu-pangkalpinang-umumkan-perolehan-suara-pilkada-ulang?>
- Bangkapos.com. (2024). Bawaslu Bangka Selatan: Kampanye Coblos Kotak Kosong Tak Langgar Aturan. Diakses pada 6 Juli 2025 dari <https://bangka.tribunnews.com/2024/08/30/bawaslu-bangka-selatan-kampanye-coblos-kotak-kosong-tak-langgar-aturan>
- Bangkapos.com. (2024). Deklarasikan Kotak Kosong, Relawan Promosikan Pilihan Kotak Kosong kepada Masyarakat Bangka Selatan. Diakses pada 6 Juli 2025 dari <https://bangka.tribunnews.com/2024/08/30/deklarasikan-kotak-kosong-relawan-promosikan-pilihan-kotak-kosong-kepada-masyarakat-bangka-selatan>
- Bangkapos.com. (2024). Demokrasi di Pangkalpinang Rusak, Cuma Satu Pendaftar, Massa Ungkap Amarah Bawa Kotak Kosong ke KPU. Diakses pada 6 Juli 2025 dari <https://bangka.tribunnews.com/2024/08/29/demokrasi-di-pangkalpinang-rusak-cuma-satu-pendaftar-massa-ungkap-amarah-bawa-kotak-kosong-ke-kpu>
- Bangkapos.com. (2024). Fenomena Kotak Kosong, Bawaslu Bangka Belitung Imbau KPU Gencarkan Sosialisasi ke Masyarakat. Diakses pada 2 Juli 2025 dari <https://bangka.tribunnews.com/2024/09/03/fenomena-kotak-kosong-bawaslu-bangka-belitung-imbau-kpu-gencarkan-sosialisasi-ke-masyarakat>
- Bangkapos.com. (2024). PP Yayasan Rumah Kotak Kosong Resmi Jadi Lembaga Pemantau Pilwako, Bisa Akses ke TPS hingga Memfoto C1. Diakses pada 2 Juli 2025 dari <https://bangka.tribunnews.com/2024/11/25/yayasan-rumah-kotak-kosong-resmi-jadi-lembaga-pemantau-pilwako-bisa-akses-ke-tps-hingga-memfoto-c1>
- Bangkapos.com. (2024). Relawan Resmikan Rumah Aspirasi Kotak Kosong, Kritisi Hadirnya Calon Tunggal di Pilwako Pangkalpinang. Diakses pada 2 Juli 2025 dari <https://bangka.tribunnews.com/2024/09/17/relawan-resmikan-rumah-aspirasi-kotak-kosong-kritisi-hadirnya-calon-tunggal-di-pilwako>
- Bangkapos.com. (2024). Relawan Kotak Kosong Muncul, Ariandi Singgung Adanya Kekecewaan Publik soal Hadirnya Calon Tunggal. Diakses pada 7 Juli 2025 dari <https://bangka.tribunnews.com/2024/09/06/relawan-kotak-kosong-muncul-ariandi-singgung-adanya-kekecewaan-publik-soal-hadirnya-calon-tunggal>

kosong-muncul-ariandi-singgung-adanya-kekecewaan-publik-soal-hadirnya-calon-tunggal.

Info Hukum. (2024). Sejarah Pilkada Serentak di Indonesia dari Masa ke Masa. UMSU. Diakses pada 14 April 2025 dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/sejarah-pilkada-serentak-di-indonesia-dari-masa-ke-masa>

Kompas.com. (2024). Paslon Petahana Menang Melawan Kotak Kosong di Pilkada Bangka Selatan. Diakses pada 14 April 2025 dari <https://regional.kompas.com/read/2024/12/08/213540178/paslon-petahana-menang-melawan-kotak-kosong-di-pilkada-bangka-selatan>.

Posbelitung.co. (2020). 77,36 Persen Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Belitung Timur 2020, KPU: Itu Sudah Baik. Diakses pada 8 Juli 2025 dari <https://belitung.tribunnews.com/2020/12/14/7736-persen-tingkat-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-belitung-timur-2020-kpu-itu-sudah-baik>

.Rumah Pemilu. (2024). Hanya Ada 1 Paslon Tunggal Kalah Sejak 2015. Diakses pada 16 Maret 2025 dari <https://rumahpemilu.org/hanya-ada-1-paslon-tunggal-kalah-sejak-2015>

.Tempo.co. (2020). Ini 25 Calon Tunggal Kepala Daerah di Pilkada 2020. Diakses pada 19 Maret 2025 dari <https://www.tempo.co/politik/ini-25-calon-tunggal-kepala-daerah-di-pilkada-2020-582673>

Tempo.co. (2024). Ketika Dua Kotak Kosong Menang di Pilkada Pangkalpinang dan Bangka. Diakses pada 14 April 2025 dari <https://www.tempo.co/pemilu/ketika-dua-kotak-kosong-menang-di-pilkada-pangkalpinang-dan-bangka-1175795>

Titi Anggraini. (2024). Calon Tunggal di Tengah Pragmatisme dan Hegemoni Elite Politik. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Diakses pada 16 Maret 2025 dari <https://law.ui.ac.id/calon-tunggal-di-tengah-pragmatisme-dan-hegemoni-elite-politik-oleh-titi-anggraini-s-h-m-h>

Wibawana, Widhia Arum. (2024). Sejarah Pilkada Serentak di Indonesia dari Masa ke Masa. Detik.com. Diakses pada 12 Maret 2025 dari <https://news.detik.com/pemilu/d-7450039/sejarah-pilkada-serentak-di-indonesia-dari-masa-ke-masa>

.Yohanes Advent Kris Damarjati & Nurul Intan. (2024). Sejarah Pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia. Kompas.id. Diakses pada 14 April 2025 dari <https://www.kompas.id/artikel/sejarah-pelaksanaan-pilkada-serentak-di-indonesia>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan Satu Pasangan Calon

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ulang Tahun 2025.

Keputusan KPU

Komisi Pemilihan Umum “Data Pemilihan Kabupaten Bangka Selatan/Kepulauan Bangka Belitung Pilkada 2020”
<https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/1903>

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 683 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 601 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024

Pengumuman Nomor : 26/Pl.02.6-Pu/1905/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU-XIII/2015 tentang Konstitusionalitas Calon Tunggal dalam Pilkada.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang syarat partai politik dan gabungan parpol sebagai pengusul pasangan calon kepala daerah